

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj-IP)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
PROV. JAWA TENGAH  
TAHUN 2016**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2017**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Jateng telah selesai. LKj-IP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Prov Jateng dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Prov Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKj-IP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang,  
**KALAKHAR BPBD PROV JAWA TENGAH**

**SARWA PRAMANA, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610211 198403 1 003**

## DAFTAR ISI

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH .....</b> | <b>1</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| A. Gambaran Umum Organisasi .....                              | 5         |
| 1. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                | 5         |
| 2. Sumberdaya.....                                             | 11        |
| B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah .....            | 21        |
| 1. Visi .....                                                  | 21        |
| 2. Misi.....                                                   | 21        |
| 3. Tujuan .....                                                | 21        |
| 4. Sasaran.....                                                | 22        |
| C. Permasalahan Utama yang Dihadapi .....                      | 22        |
| <b>BAB II PERJANJIAN KINERJA .....</b>                         | <b>24</b> |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016.....</b>           | <b>30</b> |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                            | 30        |
| 1. Sasaran Strategis 1.....                                    | 31        |
| 2. Sasaran strategis 2 .....                                   | 35        |
| 3. Sasaran Strategis 3.....                                    | 37        |
| 4. Sasaran strategis 4 .....                                   | 39        |
| 5. Sasaran Strategis 5.....                                    | 40        |
| 6. Sasaran strategis 6 .....                                   | 43        |
| 7. Sasaran strategis 7 .....                                   | 44        |
| 8. Sasaran strategis 8 .....                                   | 46        |
| 9. Sasaran strategis 9 .....                                   | 48        |
| B. Realisasi Anggaran .....                                    | 50        |
| <b>BAB IV P E N U T U P .....</b>                              | <b>52</b> |
| A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Keberhasilan .....            | 52        |
| B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....     | 55        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Indeks Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah .....           | 8  |
| Tabel 2 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah .....                    | 10 |
| Tabel 3 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah .....               | 11 |
| Tabel 4 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah .....         | 12 |
| Tabel 5 Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2016 .....         | 14 |
| Tabel 6 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2016 ..... | 15 |
| Tabel 7 Penetapan Kinerja TA 2016.....                               | 25 |
| Tabel 8 Alokasi Dana RR di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....           | 29 |
| Tabel 9 Skala Pengukuran Kinerja .....                               | 31 |
| Tabel 10 Perhitungan Kinerja Sasaran 1.....                          | 31 |
| Tabel 11 Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah .....        | 32 |
| Tabel 12 Perhitungan Kinerja Sasaran 2.....                          | 36 |
| Tabel 13 Perhitungan Kinerja Sasaran 3.....                          | 38 |
| Tabel 14 Perhitungan Kinerja Sasaran 4.....                          | 39 |
| Tabel 15 Penambahan Aset BPBD Prov Jateng .....                      | 40 |
| Tabel 16 Perhitungan Kinerja Sasaran 5.....                          | 42 |
| Tabel 17 Perhitungan Kinerja Sasaran 6.....                          | 43 |
| Tabel 18 Perhitungan Kinerja Sasaran 7 .....                         | 45 |
| Tabel 19 Perhitungan Kinerja Sasaran 8.....                          | 46 |
| Tabel 20 Perhitungan Kinerja Sasaran 9.....                          | 48 |
| Tabel 21 Kejadian dan Kerugian Bencana Jateng 2016 .....             | 49 |
| Tabel 22 Realisasi dan Efisiensi Anggaran .....                      | 50 |
| Tabel 23 Pengukuran Pencapaian Sasaran .....                         | 52 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Jawa Tengah mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dan konsekuensi dari terbitnya undang-undang tersebut adalah terdapat beberapa perubahan tentang urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mengimplementasikan UU 23 tahun 2014, pada tahun 2016 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut kedua peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk perangkat daerah yang menangani bencana yaitu BPBD Provinsi akan diatur sebagaimana amanat PP No.18 tahun 2016. Upaya kesiapan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah telah dilakukan dengan memberikan tambahan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu tupoksi terkait penanganan kebakaran. Dan sebagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk penanganan kebakaran adalah pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah telah dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008. Tugas pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah (pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekon-struksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Karaktersitik wilayah yang cukup kompleks Provinsi Jawa Tengah, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis berdampak pada terdapatnya potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana social, seperti Ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Ancaman bencana di Jateng tersebar secara merata di seluruh wilayah.

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana dan kajian rawan bencana sejak tahun 2011 (kajian rawan bencana) dan 2013 kajian risiko bencana. Risiko bencana sebagai fungsi dari interaksi antara bahaya (ancaman), kerentanan dan kapasitas bersifat dinamis. Mendasarkan hasil dua kajian tersebut, posisi Provinsi Jawa Tengah menalami penurunan peringkat Jawa Tengah pada kategori rawan dan risiko bencana, yaitu peringkat nasional risiko bencana 13 sedangkan pada peringkat rawan nomor urut 1. Artinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama 2011 – 2013 telah memberikan dampak sehingga meskipun tingkat kerawanan tinggi namun risiko bencana dapat dikurangi. Upaya-upaya penanggulangan bencana terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat

menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.

Ditingkat kabupaten/kota, mendasarkan hasil kajian BNPB tahun 2013, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota risiko tinggi, dan 13 Kabupaten/Kota lainnya termasuk risiko sedang. Hasil tersebut didasarkan pada perhitungan indeks risiko bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang kajian risiko bencana. Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (*multihazard*), dengan memperhatikan parameter-parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks rawan dan risiko bencana di 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah adalah tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Indeks Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

| No | Kabupaten/<br>Kota | Indeks Risiko 2013 |        |                  |                  | Indeks Rawan 2011 |        |                  |                 |
|----|--------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|
|    |                    | Skor               | Kelas  | Rangking<br>Prov | Rangkin<br>g Nas | Skor              | Kelas  | Rangking<br>Prov | Rangking<br>Nas |
| 1  | 2                  | 3                  | 4      | 5                | 6                | 7                 | 8      | 9                | 10              |
| 1  | Cilacap            | 132                | Tinggi | 1                | 3                | 215               | Tinggi | 1                | 17              |
| 2  | Banyumas           | 123                | Tinggi | 5                | 8                | 207               | Tinggi | 2                | 36              |
| 3  | Purbalingga        | 62                 | Tinggi | 17               | 192              | 159               | Tinggi | 28               | 226             |
| 4  | Banjarnegara       | 75                 | Tinggi | 19               | 127              | 150               | Tinggi | 23               | 289             |
| 5  | Kebumen            | 113                | Tinggi | 7                | 12               | 203               | Tinggi | 3                | 49              |
| 6  | Purworejo          | 91                 | Tinggi | 2                | 46               | 215               | Tinggi | 13               | 18              |
| 7  | Wonosobo           | 105                | Tinggi | 27               | 20               | 135               | Sedang | 5                | 358             |
| 8  | Magelang           | 94                 | Tinggi | 23               | 42               | 143               | Sedang | 11               | 326             |
| 9  | Boyolali           | 92                 | Tinggi | 18               | 43               | 159               | Tinggi | 12               | 227             |
| 10 | Klaten             | 106                | Tinggi | 30               | 19               | 123               | Sedang | 4                | 414             |
| 11 | Sukoharjo          | 82                 | Tinggi | 33               | 76               | 93                | Sedang | 16               | 482             |
| 12 | Wonogiri           | 89                 | Tinggi | 22               | 55               | 146               | Tinggi | 14               | 313             |
| 13 | Karanganyar        | 102                | Tinggi | 29               | 24               | 130               | Sedang | 8                | 388             |
| 14 | Sragen             | 76                 | Tinggi | 26               | 118              | 142               | Sedang | 21               | 334             |
| 15 | Grobogan           | 75                 | Tinggi | 16               | 126              | 162               | Tinggi | 22               | 220             |

| No | Kabupaten/<br>Kota | Indeks Risiko 2013 |        |                  |                  | Indeks Rawan 2011 |        |                  |                 |
|----|--------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|
|    |                    | Skor               | Kelas  | Rangking<br>Prov | Rangkin<br>g Nas | Skor              | Kelas  | Rangking<br>Prov | Rangking<br>Nas |
| 1  | 2                  | 3                  | 4      | 5                | 6                | 7                 | 8      | 9                | 10              |
| 16 | Blora              | 58                 | Tinggi | 20               | 222              | 150               | Tinggi | 31               | 290             |
| 17 | Rembang            | 77                 | Tinggi | 12               | 107              | 172               | Tinggi | 19               | 164             |
| 18 | Pati               | 98                 | Tinggi | 11               | 31               | 174               | Tinggi | 10               | 153             |
| 19 | Kudus              | 78                 | Tinggi | 28               | 103              | 132               | Sedang | 18               | 378             |
| 20 | Jepara             | 105                | Tinggi | 15               | 21               | 163               | Tinggi | 6                | 209             |
| 21 | Demak              | 69                 | Tinggi | 8                | 153              | 184               | Tinggi | 26               | 95              |
| 22 | Semarang           | 103                | Tinggi | 24               | 23               | 143               | Sedang | 7                | 327             |
| 23 | Temanggung         | 70                 | Tinggi | 25               | 149              | 143               | Sedang | 25               | 328             |
| 24 | Kendal             | 73                 | Tinggi | 14               | 139              | 167               | Tinggi | 24               | 190             |
| 25 | Batang             | 62                 | Tinggi | 13               | 193              | 168               | Tinggi | 29               | 175             |
| 26 | Pekalongan         | 76                 | Tinggi | 10               | 116              | 183               | Tinggi | 20               | 97              |
| 27 | Pemalang           | 78                 | Tinggi | 6                | 101              | 206               | Tinggi | 17               | 37              |
| 28 | Tegal              | 64                 | Tinggi | 3                | 180              | 213               | Tinggi | 27               | 26              |
| 29 | Brebes             | 101                | Tinggi | 4                | 25               | 211               | Tinggi | 9                | 29              |
| 30 | Kota Magelang      | 44                 | Tinggi | 32               | 343              | 108               | Sedang | 34               | 459             |
| 31 | Kota Surakarta     | 60                 | Tinggi | 35               | 207              | 80                | Sedang | 30               | 490             |
| 32 | Kota Salatiga      | 34                 | Sedang | 34               | 404              | 91                | Sedang | 35               | 485             |
| 33 | Kota Semarang      | 87                 | Tinggi | 9                | 60               | 184               | Tinggi | 15               | 96              |
| 34 | Kota Pekalongan    | 52                 | Tinggi | 21               | 272              | 148               | Tinggi | 32               | 306             |
| 35 | Kota Tegal         | 46                 | Tinggi | 31               | 322              | 117               | Sedang | 33               | 441             |

Sumber : BNPP

Mendasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya kerawanan bencana akan semakin berkurang bahayanya jika ada upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan peningkatan kapasitas masyarakat maupun penurunan tingkat kerentanan. Dalam kerangka penanganan bencana sejak dini, paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indicator keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) factor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Mengurangi ancaman/bahaya

Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.

2. Mengurangi kerentanan

Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.

3. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas

Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

BPBD Jawa Tengah telah mencermati dan menindaklanjuti dengan mengumpulkan data daerah rawan bencana yang meliputi wilayah desa /kelurahan, kecamatan dan warga terdampak. Data daerah rawan bencana Jawa Tengah adalah sebagaimana pada table berikut.

**Tabel 2**  
**Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah**

| No | Bencana              | Kab |       | Kec |      | Desa/Kel |      | KK      |     |
|----|----------------------|-----|-------|-----|------|----------|------|---------|-----|
|    |                      | Jml | %     | Jml | %    | Jml      | %    | Jml     | %   |
| 1  | 2                    | 3   | 4     | 5   | 6    | 7        | 8    | 9       | 10  |
| 1  | Banjir               | 32  | 91,42 | 314 | 54.8 | 1.776    | 20,7 | 772.177 | 8,0 |
| 2  | Longsor              | 29  | 82,85 | 342 | 59.7 | 2.331    | 27.2 | 642.001 | 6,6 |
| 3  | Kekeringan           | 27  | 77,14 | 235 | 41   | 1.443    | 16.8 | 677.952 | 7.0 |
| 4  | Angin puting beliung | 12  | 42,85 | 132 | 23.0 | 752      | 8,8  | 282.212 | 2,9 |

| No | Bencana               | Kab |       | Kec |      | Desa/Kel |      | KK        |      |
|----|-----------------------|-----|-------|-----|------|----------|------|-----------|------|
|    |                       | Jml | %     | Jml | %    | Jml      | %    | Jml       | %    |
| 1  | 2                     | 3   | 4     | 5   | 6    | 7        | 8    | 9         | 10   |
| 5  | Gempabumi             | 14  | 37,14 | 116 | 20,2 | 1.514    | 17,6 | 1.416.145 | 15,1 |
| 6  | Tsunami               | 4   | 11,42 | 20  | 3,5  | 127      | 1,5  | 128.186   | 1,3  |
| 7  | Gunung api            | 11  | 31,42 | 47  | 8,2  | 276      | 3,2  | 200.634   | 2,1  |
| 8  | Gas Beracun           | 3   | 8,57  | 13  | 2,3  | 44       | 0,5  | 33.744    | 1,3  |
| 9  | Kebakaran Hutan/Lahan | 22  | 62,85 | 122 | 21,3 | 749      | 8,7  | 169.498   | 1,7  |

## 2. Sumberdaya

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah cukup terbatas. Jumlah dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah**

| No | Pegawai         | Jumlah |        | Pendidikan Terakhir |    |    |     |     |    |       |
|----|-----------------|--------|--------|---------------------|----|----|-----|-----|----|-------|
|    |                 | Pria   | Wanita | S2                  | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | Total |
| 1  | 2               | 3      | 4      | 5                   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10 | 11    |
| 1  | PNS             | 46     | 13     | 18                  | 19 | 1  | 18  | 3   | -  | 59    |
| 2  | Non PNS         | -      | -      | -                   | -  | -  | -   | -   | -  | -     |
|    | a. Harian Lepas | 1      | -      | -                   | -  | -  | 1   | -   | -  | 1     |
|    | b. Outsourcing  | 17     | 3      | -                   | 16 | -  | 4   | -   | -  | 20    |
|    | Total           | 64     | 18     | 18                  | 31 | 1  | 28  | 3   | -  | 80    |

Sumber: Data Pegawai BPBD s.d Desember 2016

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah**

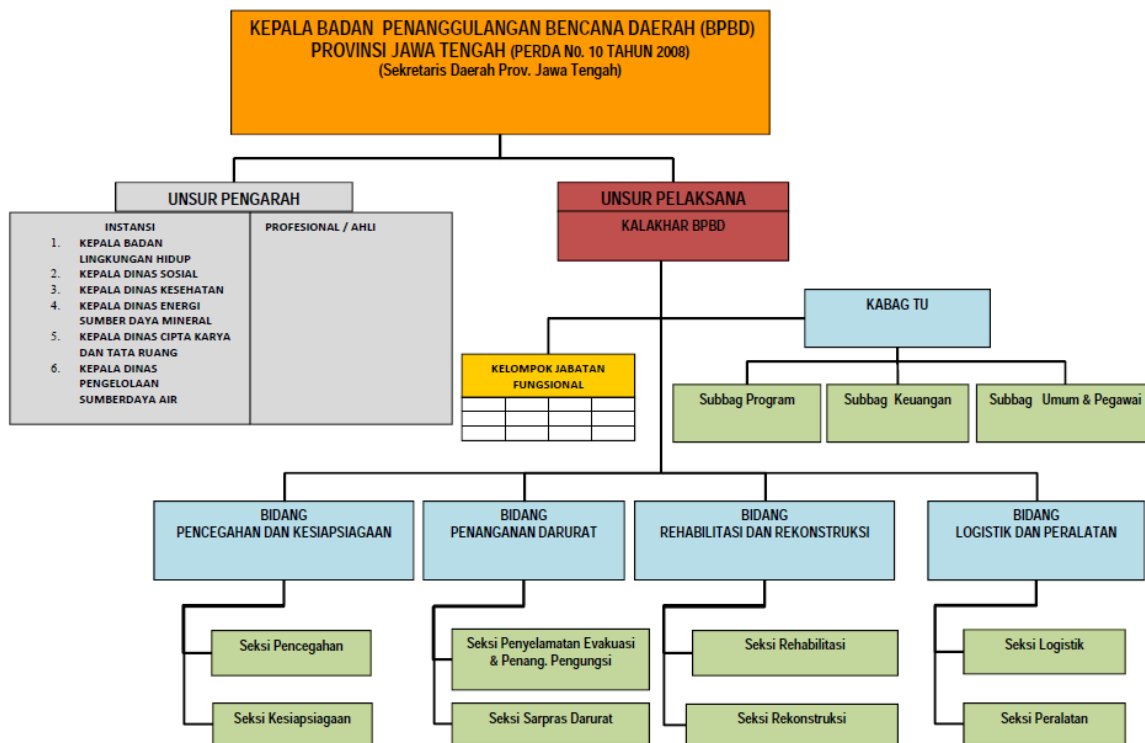
| No     | Pangkat / Gol              | Jumlah     |
|--------|----------------------------|------------|
| 1      | 2                          | 3          |
| 1      | Golongan IV                | : 14 orang |
| a      | Pembina Utama Madya (IV/d) | : 1 orang  |
| b      | Pembina Utama Muda (IV/c)  | : - orang  |
| c      | Pembina Tk I (IV/b)        | : 4 orang  |
| c      | Pembina (IV/a)             | : 9 orang  |
| 2      | Golongan III               | : 33 orang |
| a      | Penata Tk I (III/d)        | : 9 orang  |
| b      | Penata (III/c)             | : 6 orang  |
| c      | Penata Muda Tk I (III/b)   | : 18 orang |
| d      | Penata Muda (III/a)        | : 1 orang  |
| 3      | Golongan II                | : 11 orang |
| a      | Pengatur Tk I (II/d)       | : - orang  |
| b      | Pengatur (II/c)            | : 4 orang  |
| c      | Pengatur Muda Tk I (II/b)  | : 6 orang  |
| d      | Pengatur Muda (II/a)       | : 1 orang  |
| 4      | Golongan I                 | : 4 orang  |
| a      | Juru Tk I (I/d)            | : - orang  |
| b      | Juru (I/c)                 | : 1 orang  |
| c      | Juru Muda Tk I (I/b)       | : - orang  |
| d      | Juru Muda (I/a)            | : 3 orang  |
| JUMLAH |                            | : 59 orang |

Secara kelembagaan, BPBD Provinsi terdiri dari unsur pelaksana dan unsur pengarah. Unsur pengarah BPBD Prov Jawa Tengah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Unsur Pengarah BPBD Prov. Jateng sejumlah 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri dari 6 (enam) orang Perwakilan SKPD dan 5 (lima) orang mewakili Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional. Anggota Unsur pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pengarah dari SKPD, terdiri dari :
- 1) Kepala Badan Lingkungan Hidup;
  - 2) Kepala Dinas Sosial;
  - 3) Kepala Dinas Kesehatan;

- 4) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
  - 5) Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
  - 6) Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air.
- b. Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum melakukan pengisian kembali anggota unsur pengarah dari masyarakat professional/ahli, sejak keanggotaan unsur pengarah dari masyarakat professional/ahli berakhir per tanggal 20 Mei 2015.

Secara struktur organisasi, kelembagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



**Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan beberapa peralatan baik yang bersifat umum maupun khusus, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5**  
**Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2016**

| No | Nama Bidang                            | 31 Des 2015 (1 Jan 2016) |                       | 31 Des 2016  |                       |
|----|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|    |                                        | Jumlah                   | Harga (Rp)            | Jumlah       | Harga (Rp)            |
| 1  | 2                                      | 3                        | 4                     |              |                       |
| 1  | TANAH                                  | 2                        | 3,100,000,000         | 2            | 3,100,000,000         |
|    | Tanah                                  | 2                        | 3,100,000,000         | 2            | 3,100,000,000         |
| 2  | PERALATAN DAN MESIN                    | 2.733                    | 16,786,846,469        | 2.789        | 17,058,485,969        |
|    | Alat-alat besar                        | 27                       | 2,843,695,000         | 27           | 2,843,695,000         |
|    | Alat-alat Angkutan                     | 74                       | 6,331,416,446         | 74           | 6,331,416,446         |
|    | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur        | 6                        | 309,100,000           | 6            | 309,100,000           |
|    | Alat-alat Pertanian / Peternakan       |                          |                       |              |                       |
|    | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga      | 1,875                    | 4,650,888,071         | 1,931        | 4,893,487,571         |
|    | Alat-alat Studio dan Komunikasi        | 546                      | 1,444,094,949         | 549          | 1,473,134,949         |
|    | Alat-alat Kedokteran                   |                          |                       |              |                       |
|    | Alat-alat Laboratorium                 |                          |                       |              |                       |
|    | Alat-alat Keamanan                     | 205                      | 1,207,652,003         | 205          | 1,207,652,003         |
|    | Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur |                          |                       |              |                       |
|    | Alat Olah Raga                         |                          |                       |              |                       |
| 3  | GEDUNG DAN BANGUNAN                    | 3                        | 6,877,783,968         | 3            | 6,877,783,968         |
|    | Bangunan Gedung                        | 3                        | 6,877,783,968         | 3            | 6,877,783,968         |
| 4  | JALAN, DAN IRIGASI                     | 8                        | 180,433,000           |              |                       |
|    | Jalan dan Jembatan                     |                          |                       |              |                       |
|    | Bangunan Air / Irigasi                 | 7                        | 89,000,000            | 7            | 89,000,000            |
|    | Instalasi                              | 1                        | 91,433,000            | 1            | 91,433,000            |
|    | Jaringan                               |                          |                       |              |                       |
| 5  | ASET TETAP LAINNYA                     | 483                      | 53,847,955.00         | 483          | 53,847,955.00         |
|    | Buku Perpustakaan                      | 476                      | 52,972,955.00         | 476          | 52,972,955.00         |
|    | Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan  | 7                        | 875,000               | 7            | 875,000               |
|    | Hewan Ternak dan Tumbuhan              |                          |                       |              |                       |
| 6  | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan            |                          |                       |              |                       |
|    | Konstruksi Dalam Pengerjaan            |                          |                       |              |                       |
|    | <b>JUMLAH</b>                          | <b>3.229</b>             | <b>26.998.911.392</b> | <b>3.288</b> | <b>27.270.550.892</b> |

Sumber: Jurnal Mutasi Barang Desember 2016

Sedangkan sarana dan prasarana untuk kondisi tertentu seperti kendaraan dengan fungsi khusus, seperti kendaraan transportasi, komunikasi, peralatan/perlengkapan evakuasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6**  
**Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2016**

| No | Kode | Jenis Peralatan               |                                       | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2    | 3                             |                                       | 4             | 5          |
| I  | 01   | Alat Transportasi             |                                       |               |            |
|    |      | 1                             | Mobil Ambulance                       | 5             | -          |
|    |      | 2                             | Mobil Tangki BBM                      | -             | -          |
|    |      | 3                             | Mobil Evakuasi                        | 1             | -          |
|    |      | 4                             | Mobil Pemadam Kebakaran               | 3             | -          |
|    |      | 5                             | Helikopter                            | -             | -          |
|    |      | 6                             | Mobil Komando                         | 1             | -          |
|    |      | 7                             | Mobil Patroli                         | -             | -          |
|    |      | 8                             | Mobil Jelajah                         | -             | -          |
|    |      | 9                             | Mobil Operasional                     | 16            | -          |
|    |      | 10                            | Mobil Komunikasi                      | 1             | -          |
|    |      | 11                            | Mobil Rescue                          | 16            | -          |
|    |      | 12                            | Motor Ops                             | 28            | -          |
|    |      | 13                            | Motor Trail                           | 15            | -          |
|    |      | 14                            | Mobil Jenazah                         | -             | -          |
|    |      | 15                            | Mobil Box                             | -             | -          |
|    |      | 16                            | Pick Up                               | 5             | -          |
|    |      | 17                            | Mobil Logpal                          | 1             | -          |
|    |      | 18                            | Truk Serbaguna                        | 1             | -          |
|    |      | 19                            | Mobil Dapur Lapangan                  | 1             | -          |
|    |      | 20                            | Truk Logistik                         | 1             | -          |
|    |      | 21                            | Truk Tangki Air                       | 25            | -          |
|    |      | 22                            | Truk Urinoir MCK                      | 2             | -          |
|    |      | 23                            | Mobil Water Treatmen                  | 2             | -          |
|    |      | 24                            | Truk bak terbuka                      | 2             | -          |
|    |      | 25                            | Kapal Motor                           | -             | -          |
|    |      | 26                            | Mini Bus                              | 3             | -          |
|    |      | 27                            | Mobil Klik                            | 2             | -          |
|    |      |                               | Jumlah                                | 131           | -          |
| II | 02   | Alat Komunikasi dan Informasi |                                       |               |            |
|    |      | 1                             | Sistem Komunikasi Cepat               | -             | -          |
|    |      | 2                             | Portable Communication Mobile         | -             | -          |
|    |      | 3                             | HT                                    | 61            | -          |
|    |      | 4                             | RIG                                   | 39            | -          |
|    |      | 5                             | GPS                                   | 4             | -          |
|    |      | 6                             | Telepon Internet Satelit              | 1             | -          |
|    |      | 7                             | Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini | -             | -          |

| No  | Kode | Jenis Peralatan                          |                                    | Jumlah (unit) | Keterangan |
|-----|------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1   | 2    | 3                                        |                                    | 4             | 5          |
|     |      | 8                                        | SSB/RPP                            | 16            | -          |
|     |      | 9                                        | UHF                                | 2             | -          |
|     |      | 10                                       | Wireless                           | -             | -          |
|     |      | 11                                       | Megaphone                          | 5             | -          |
|     |      | 12                                       | Repiter / Antena                   | 5             | -          |
|     |      | 13                                       | Video Shooting                     | 1             | -          |
|     |      | 14                                       | Camera Digital                     | 12            | -          |
|     |      | 15                                       | Handycam                           | 3             | -          |
|     |      | 16                                       | Power Supply                       | 2             | -          |
|     |      |                                          | Jumlah                             | 151           | -          |
| III | 03   | Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi |                                    |               |            |
|     |      | 1                                        | Alat Pemotong Baja dan Beton       | 5             | -          |
|     |      | 2                                        | Rompi                              | 208           | -          |
|     |      | 3                                        | Life Jacket/Rompi Pelampung        | 142           | -          |
|     |      | 4                                        | Lifebouy                           | 8             | -          |
|     |      | 5                                        | Perahu Karet 12 org                | 0             | -          |
|     |      | 6                                        | Perahu Karet 10 org                | 23            | -          |
|     |      | 7                                        | Perahu Karet 8 org                 | 20            | -          |
|     |      | 8                                        | Perahu Karet 6 org                 | 1             | -          |
|     |      | 9                                        | Masker Full Face                   | 6             | -          |
|     |      | 10                                       | Perahu Lipat + Mesin 18 PK         | 1             | -          |
|     |      | 11                                       | Trailer                            | 3             | -          |
|     |      | 12                                       | Perahu Polyethylene + Mesin 9,8 PK | 2             | -          |
|     |      | 13                                       | Mesin Perahu 40 PK                 | 5             | -          |
|     |      | 14                                       | Mesin Perahu 25 PK                 | 9             | -          |
|     |      | 15                                       | Mesin Perahu 18 PK                 | 5             | -          |
|     |      | 16                                       | Mesin Perahu 15 PK                 | 5             | -          |
|     |      | 17                                       | Dolphin / speed boat               | 4             | -          |
|     |      | 18                                       | Peralatan Selam                    | 9             | -          |
|     |      | 19                                       | Vertical Rescue                    | 3             | -          |
|     |      | 20                                       | Teropong / Teleskop                | 5             | -          |
|     |      | 21                                       | Chain Saw                          | 24            | -          |
|     |      | 22                                       | Helm SAR                           | 4             | -          |
|     |      | 23                                       | Pulay                              | 10            | -          |
|     |      | 24                                       | Breathing Appars                   | 2             | -          |
|     |      | 25                                       | Life Detector                      | 0             | -          |
|     |      | 26                                       | Alat/Paket Pemadam Kebakaran       | 2             | -          |
|     |      | 27                                       | Pakaian Tahan Panas                | 2             | -          |
|     |      | 28                                       | Pompa Perahu                       | 22            | -          |
|     |      | 29                                       | Rak Tempat Perahu Karet            | 7             | -          |

| No | Kode | Jenis Peralatan                |                        | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|------|--------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2    | 3                              |                        | 4             | 5          |
|    |      | 30                             | Selang BBM             | 16            | -          |
|    |      | 31                             | Sandaran Mesin Tempel  | 4             | -          |
|    |      | 32                             | Perahu Alumunium       | 14            | -          |
|    |      | 33                             | Jangkar                | 2             | -          |
|    |      | 34                             | Ring Buoy              | 10            | -          |
|    |      | 35                             | Tali PP 10 mm          | 2             | -          |
|    |      | 36                             | Tangki BBM             | 18            | -          |
|    |      | 37                             | Dayung                 | 48            | -          |
|    |      | 38                             | Pakaian Tahan Api      | 7             | -          |
|    |      | 39                             | Helm Tahan Panas       | 4             | -          |
|    |      | 40                             | Sepatu                 | 44            | -          |
|    |      | 41                             | Sarung Tangan          | 4             | -          |
|    |      | 42                             | Helm Biasa             | 9             | -          |
|    |      | 43                             | Perahu Kayu            | 2             | -          |
|    |      | 44                             | Bidai Spinal           | 2             | -          |
|    |      | 45                             | Perahu Amphibi         | 1             | -          |
|    |      |                                | Jumlah                 | 724           | -          |
| IV | 04   | Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar |                        |               |            |
|    |      | 1                              | WTP 250 lt             | 2             | -          |
|    |      | 2                              | WTP 500 lt             | 0             | -          |
|    |      | 3                              | WTP mini               |               | -          |
|    |      | 4                              | Dapur Lapangan/Umum    | 14            | -          |
|    |      | 5                              | Fleksible Tank 2000 lt | 2             | -          |
|    |      | 6                              | Fleksible Tank 1000 lt | 2             | -          |
|    |      | 7                              | Toilet Lapangan        | 0             | -          |
|    |      | 8                              | Tenda Posko            | 14            | -          |
|    |      | 9                              | Tenda Keluarga         | 329           | -          |
|    |      | 10                             | Tenda Regu             | 109           | -          |
|    |      | 11                             | Tenda Pleton           | 106           | -          |
|    |      | 12                             | Tenda Pengungsi        | 40            | -          |
|    |      | 13                             | Tenda Sekolah          | 0             | -          |
|    |      | 14                             | Tenda Lapangan         | 10            | -          |
|    |      | 15                             | Tenda RS Lapangan      | 1             | -          |
|    |      | 16                             | Tenda Individu         | 12            | -          |
|    |      | 17                             | Tenda Doom             | 100           | -          |
|    |      | 18                             | Tandu Lipat            | 12            | -          |
|    |      | 19                             | Echosounder            | 2             | -          |
|    |      | 20                             | Velbed                 | 411           | -          |
|    |      | 21                             | Tandon Air Plastik     | 4             | -          |
|    |      | 22                             | Tandon Air Fiber Glas  | 2             | -          |

| No | Kode | Jenis Peralatan                 |                               | Jumlah (unit) | Keterangan |
|----|------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2    | 3                               |                               | 4             | 5          |
|    |      | 23                              | Tandu Spinal                  | 6             | -          |
|    |      | 24                              | Tenda Terpal Plastik          | 1.118         | -          |
|    |      | 25                              | Jas Hujan                     | 0             | -          |
|    |      | 26                              | MCK Komunal                   | 80            | -          |
|    |      |                                 | Jumlah                        | 2.378         | -          |
| V  | 05   | Alat Berat                      |                               |               |            |
|    |      | 1                               | Scope Loader                  | 0             | -          |
|    |      | 2                               | Back Hoe                      | 1             | -          |
|    |      | 3                               | Truck W Crane 3 Ton           | 8             | -          |
|    |      | 4                               | Tandem Vibration Roller 4 Ton | 10            | -          |
|    |      | 5                               | Crane on Wheel 15 Ton         | 1             | -          |
|    |      | 6                               | Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3     | 1             | -          |
|    |      | 7                               | Head Tractor & trailer        | 2             | -          |
|    |      | 8                               | Loader                        | 0             | -          |
|    |      | 9                               | Exavator                      | 7             | -          |
|    |      | 10                              | Dump Truck                    | 27            | -          |
|    |      | 11                              | Grader                        | 0             | -          |
|    |      | 12                              | Bulldoser                     | 1             | -          |
|    |      | 13                              | Ponton                        | 1             | -          |
|    |      | 14                              | Vibro Hammer                  | 5             | -          |
|    |      | 15                              | Wheel Loader                  | 0             | -          |
|    |      | 16                              | Ulhantor Roller               | 0             | -          |
|    |      |                                 | Jumlah                        | 64            | -          |
| VI | 06   | Alat Penerangan dan Kelistrikan |                               |               |            |
|    |      | 1                               | Senter                        | 11            | -          |
|    |      | 2                               | Solar Sel Generator           | 0             | -          |
|    |      | 3                               | Lampu Senter HID              | 2             | -          |
|    |      | 4                               | Lampu Srt Halogen             | 3             | -          |
|    |      | 5                               | Lampu Badai                   | 0             | -          |
|    |      | 6                               | Genset 5 KVA                  | 14            | -          |
|    |      | 7                               | Genset 10 KVA                 | 6             | -          |
|    |      | 8                               | Genset 1,2 KW                 | 1             | -          |
|    |      | 9                               | Genset 1000 watt              | 4             | -          |
|    |      | 10                              | Solar Handle Lamp             | 6             | -          |
|    |      | 11                              | Lampu Penerangan (Solar Cell) | 60            | -          |
|    |      | 12                              | Light Tower Port              | 7             | -          |
|    |      | 13                              | Lampu senter HID Seacrh Light | 2             | -          |
|    |      | 14                              | Kabel                         | 4             | -          |
|    |      | 15                              | Tiang Lampu Lapangan          | 5             | -          |
|    |      | 16                              | Lampu Lapangan (Sport Light)  | 4             | -          |
|    |      | 17                              | Senter Besar                  | 6             | -          |

| No   | Kode | Jenis Peralatan  |                   | Jumlah (unit) | Keterangan |
|------|------|------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1    | 2    | 3                |                   | 4             | 5          |
|      |      | 18               | Lampu Rotator     | 30            | -          |
|      |      | 19               | Lampu Sorot       | 0             | -          |
|      |      | 20               | Emergency Lamp    | 6             | -          |
|      |      |                  | Jumlah            | 171           | -          |
| VII  | 7    | Alat Pergudangan |                   |               |            |
|      |      | 1                | Froklift          | 1             | -          |
|      |      | 2                | Hand Froklift     | 1             | -          |
|      |      | 3                | Gerobak Sorong    | 0             | -          |
|      |      | 4                | Trolley           | 2             | -          |
|      |      | 5                | Rak Gondola       | 0             | -          |
|      |      | 6                | Palka             | 100           | -          |
|      |      | 7                | Safety Equipment  | 0             | -          |
|      |      | 8                | Tenda Gudang      | 0             | -          |
|      |      | 9                | Water Closed      | 0             | -          |
|      |      | 10               | Tabung Gas 12 Kg  | 3             | -          |
|      |      | 11               | Tabung Gas 3 Kg   | 7             | -          |
|      |      | 12               | Selang            | 0             | -          |
|      |      | 13               | Helm Kerja / PMK  | 0             | -          |
|      |      | 14               | Topi Proyek       | 0             | -          |
|      |      |                  | Jumlah            | 114           | -          |
| VIII | 8    | Alat Lainnya     |                   |               |            |
|      |      | 1                | Pompa air         | 53            | -          |
|      |      | 2                | Kawat Bronjong    | 7.733         | -          |
|      |      | 3                | Karung Plastik    | 228.000       | -          |
|      |      | 4                | Garpu Sampah      | 32            | -          |
|      |      | 5                | Dirigen 40 L      | 0             | -          |
|      |      | 6                | Hand Sprayer      | 0             | -          |
|      |      | 7                | Knock Down Closet | 0             | -          |
|      |      | 8                | Mesin Fogging     | 0             | -          |
|      |      | 9                | Drag Bar          | 0             | -          |
|      |      | 10               | Water furifier    | 2             | -          |
|      |      | 11               | CCTV              | 8             | -          |
|      |      |                  | Jumlah            | 238.828       | -          |
|      |      |                  | Jumlah Total      | 239.561       | -          |

Sumber : Data Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah s.d Desember 2016 pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Prov Jateng

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sebagai *leading sector* sebagaimana amanat Perda 11 tahun 2009. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi meliputi tiga yaitu: pra, saat dan pascabencana. Oleh sebab itu, BPBD Prov Jawa Tengah bertanggungjawab dalam tiga tugas utama, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Sebagai pelaksana, BPBD wajib untuk memberikan perlindungan dan penanggulangan bencana, sedangkan fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando/perintah kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, sedangkan fungsi koordinasi dilaksanakan untuk mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana agar terstruktur, terencana dan sinergi.

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov Jawa Tengah dioptimalkan untuk penanganan bencana terutama pada tahapan pra bencana. Pada tahapan ini, kegiatan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, perencanaan, dan peringatan dini (*early warning*) mempunyai nilai strategis yang dapat menentukan kegiatan pada saat tahap darurat. Tahap saat bencana (tanggap darurat) merupakan tahap yang sangat krusial. Pada tahap ini kegiatan penanggulangan bencana bertumpu pada upaya penyelamatan, evakuasi, dan penanganan permasalahan pengungsian (jika ada). Pengungsian ini menjadi salah satu isu penting karena dampak bencana menyebabkan kerusakan tempat tinggal sehingga masyarakat terdampak memerlukan tempat hunian. Tindakan saat darurat akan disusul dengan fase transisi dan kemudian tahapan pasca bencana (tahap pemulihan). Tahapan ini terdiri dari dua prioritas, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip dasar dari fase pemulihan ini adalah untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman.

Mendasarkan pada paradigma penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana, maka upaya-upaya pada pra bencana (tidak terjadi bencana ataupun terdapat potensi terjadi bencana) menjadi lebih dominan dibandingkan dengan penanganan saat bencana. Upaya yang dilakukan pada fase pra bencana menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam penanggulangan bencana. Upaya pengurangan risiko bencana tidak

terlepas dari dukungan seluruh elemen pemangku kepentingan baik tingkat pemerintahan, lembaga usaha dan juga masyarakat. Komitmen yang kuat untuk mengurangi risiko bencana sangat diperlukan untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah**

BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat, dan pascabencana.

### **1. Visi**

Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana

### **2. Misi**

- a. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana yang handal
- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
- c. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- d. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan PB
- e. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

### **3. Tujuan**

- a. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana;
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
- g. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional.

#### **4. Sasaran**

- a. Tersusunnya Peraturan /Pedoman/SOP bidang Kebencanaan
- b. Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
- c. Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
- d. Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- e. Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah
- f. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
- g. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
- h. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- i. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana Jateng terkini
- j. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan lokal

#### **C. Permasalahan Utama yang Dihadapi**

BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu disikapi dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan PB secara menyeluruh. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah:

1. Kelembagaan BPBD di kabupaten/kota belum terbentuk 100%. Terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasar Peraturan daerah, yaitu Kota Magelang, dan kota Salatiga
2. Belum seluruh BPBD Kabupaten/Kota mempunyai dan menyusun Perda tentang Penyelenggaraan PB. Terdapat 16 kabupaten/kota yang sudah mempunyai Perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga rasio dana PB dengan APBD Kabupaten/Kota belum ideal

4. Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang ideal untuk logistik, peralatan, sarana/prasarana PB dan Pusdalops
5. Kapasitas sumberdaya manusia di BPBD sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas
6. Penyediaan Logistik dan peralatan PB belum ideal. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah yang harus disediakan dengan yang dimiliki
7. Kerjasama penanggulangan bencana meliputi kerjasama dengan Dunia usaha, media massa, maupun penggiat PB masih perlu terus ditingkatkan.
8. Dunia usaha di Jateng sangat besar dan sangat potensial untuk ikut serta dalam PB melalui CSR
9. Penataan kelembagaan BPBD di daerah masih perlu diperkuat melalui peraturan sesuai dengan amanat undang-undang yang bersifat teknis maupun administrative pemerintahan

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Gubernur dengan Kepala Pelaksana BPBD Prov Jawa Tengah. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Jawa Tengah selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Secara singkat keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

**Tabel 7**  
**Penetapan Kinerja TA 2016**

| SASARAN                                                                                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                           | TARGET                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                           | 3                                      |
| Tersusunnya Peraturan/Pedoman /SOP bidang PB                                                                                              | Peraturan/Pedoman SOP dalam penanggulangan bencana                          | 1 pedoman                              |
|                                                                                                                                           | Pembentukan BPBD Kab/Kota mll Perda                                         | 2 kab/kota                             |
| Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah                                                                                        | Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana                              | 1 unit                                 |
|                                                                                                                                           | Tersusunnya kesepahaman penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah | 2 dok                                  |
| Terintegrasinya dokumen rencana penanggulangan bencana (umum dan tematik ) dalam dokumen rencana pembangunan daerah                       | Tersusunnya Rencana bidang PB Jateng                                        | 2 dok                                  |
|                                                                                                                                           | Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng                             | Peta bencana kekeringan di 6 kabupaten |
| Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana                                                                           | Jumlah kursus dan diklat PB / pendukung PB                                  | 15 kali                                |
|                                                                                                                                           | Jumlah masyarakat mengikuti kegiatan PB                                     | 2.100 orang                            |
|                                                                                                                                           | Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB                           | 240 orang                              |
| Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana                                                                                  | jumlah sarana dan prasarana PB                                              | 1 paket logistik dan peralatan         |
|                                                                                                                                           | Rakor Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana                        | 12 kali                                |
| Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali danantisipasi ancaman bahaya                                              | Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB                                     | 500 orang                              |
|                                                                                                                                           | Jumlah bintek/latihan Penanganan Darurat                                    | 3 keg                                  |
| terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB                                                                               | Jumlah desa siaga bencana                                                   | 2 desa                                 |
|                                                                                                                                           | Jumlah desa tangguh bencana                                                 | 6 desa                                 |
| Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana | Jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi              | 2 dok                                  |
|                                                                                                                                           | Jumlah komunitas peduli bencana                                             | 1 komunitas                            |
|                                                                                                                                           | Jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR                     | 10 dunia usaha                         |
|                                                                                                                                           | Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah                        | 1 kali                                 |
|                                                                                                                                           | Jumlah media publikasi data dan informasi PB                                | 3 media                                |
| Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini                                                 | Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,bencana             | 1 unit                                 |
|                                                                                                                                           | System early warning masyarakat                                             | 2 keg                                  |
|                                                                                                                                           | Jumlah publikasi di media                                                   | 150 publikasi                          |

BPBD Prov Jawa Tengah telah melaksanakan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Tengah dengan melaksanakan telah melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 65 (enam puluh lima) yang didukung oleh APBD Prov Jawa Tengah sebesar Rp. 15.608.914.000,- Selain dari APBD Prov Jawa Tengah, terdapat pula beberapa program/kegiatan yang dikelola melalui dana APBN melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),:

#### 1. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dukungan tersebut dialokasikan melalui mekanisme anggaran Dana Dekonsentrasi TA 2016 kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 481.000.000,- yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan, yaitu Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Kegiatan dilaksanakan di Kota Surakarta pada hari Selasa - Sabtu, 6 - 10 September 2016, dengan peserta kegiatan berjumlah 100 (seratus) orang yang berasal dari BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas Damkar Kabupaten/Kota. Kegiatan terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 475.292.234,- (98.81%)

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dana dekonsentrasi Kemendagri dimaksudkan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Kebakaran sehingga pemahaman aparatur pemerintah kabupaten/kota terkait Arah kebijakan dalam Penyelenggaraan Bencana dan Penanggulangan Kebakaran sesuai UU No 23 tahun 2014 dan UU No. 24 tahun 2007 maupun keterampilan dan keahlian dalam penyusunan dokumen kedaruratan kebakaran dan praktik pemadaman kebakaran semakin meningkat. Sebagai ilustrasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Rakor Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

## 2. BNPB

Fasilitasi dan penguatan kapasitas BPBD terus dilakukan oleh BNPB. BNPB memfasilitasi dan melakukan penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

### a. Dana Siap Pakai (DSP)

DSP merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan). Alokasi dana siap pakai BNPB yang ditransfer ke Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan bencana Tanah longsor yang ditransfer langsung ke BPBD Kabupaten Purworejo sebesar Rp.250.000.000,- dan untuk tahun 2016 alokasi DSP akan dialokasikan untuk antisipasi bencana Banjir dan Tanah Longsor 2016-2017, dengan total pagu anggaran DSP sebesar Rp. 8.706.041.080,- dengan rincian Rp. 7.735.961.080,- untuk 32 Kabupaten/ Kota dan Rp. 970.080.000,- untuk BPBD Prov Jateng. Penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor digunakan antara lain untuk aktivasi Posko bencana, pengadaan logistik, dan bahan material kebencanaan lainnya selama masa siaga darurat bencana.

#### b. Dana Penguatan Kelembagaan BPBD

BNPB selain memberikan dukungan anggaran melalui dana siap pakai, BNPB juga mengalokasikan anggaran untuk penguatan kapasitas kelembagaan PB. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Pengurangan Risiko Bencana berbasis sekolah yaitu dengan Sosialisasi Sekolah/Madrasah aman bencana. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp. 267.948.000,- digunakan untuk kegiatan dengan peserta sebanyak 100 orang dari para tenaga pendidik/guru di Kota Semarang. Selain dalam bentuk sosialisasi /rapat, alokasi anggaran digunakan pula dalam rangka pemantauan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan PRB di Wonogiri, Boyolali, Kota Surakarta, Karanganyar, Klaten dan Sukoharjo.

#### c. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) Pasca Bencana merupakan dana bantuan dari BNPB kepada BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan proses recovery sector terdampak bencana. Alokasi dana tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, jembatan, saluran air, dan untuk BPBD Provinsi alokasi dana rehabilitasi rekonstruksi difungsikan untuk pendampingan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota penerima dana hibah Rehab Rekon pasca bencana dari BNPB.

Tahun 2016, mekanisme pendanaan bantuan dana rehab rekons berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mekanisme hibah yang selama ini dilakukan oleh BNPB kepada BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Namun sejak tahun 2015 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.07/2015 tentang hibah dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mekanisme bantuan dilakukan melalui transfer ke kas daerah. Dengan demikian pendanaan akan mengikuti mekanisme APBD.

Alokasi Dana rehab rekons pasca bencana untuk BPBD Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar Rp. 646.414.000,-. Dana tersebut digunakan untuk monitoring dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) BPBD Kabupaten/kota yang memperoleh

dana tersebut. Tahun 2016 Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana yang bersumber dari anggaran hibah pemerintah pusat yang ditransfer pada akhir tahun anggaran 2015. Terdapat 8 (delapan) Kabupaten yang memperoleh dana hibah rehab rekon pasca bencana yaitu:

**Tabel 8**  
**Alokasi Dana RR di Kabupaten/Kota Jawa Tengah**

| <b>No</b> | <b>Kabupaten</b> | <b>Jumlah</b>               | <b>Paket Pekerjaan</b> |
|-----------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1         | Cilacap          | 2.344.192.000               | 2                      |
| 2         | Kebumen          | 14.417.531.000              | 14                     |
| 3         | Temanggung       | 8.737.925.000               | 12                     |
| 4         | Karanganyar      | 5.123.359.000               | 3                      |
| 5         | Jepara           | 7.557.468.000               | 16                     |
| 6         | Pati             | 14.676.737.000              | 11                     |
| 7         | Pekalongan       | 15.388.101.000              | 5                      |
| 8         | Semarang         | 920.984.000                 | 1                      |
|           | <b>JUMLAH</b>    | <b>Rp. 69.812.716.000,-</b> | <b>64</b>              |

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Skala Pengukuran Kinerja**

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | 2                     | 3           |
| 1  | Lebih dari 100%       | Sangat Baik |
| 2  | 75 – 100%             | Baik        |
| 3  | 55 – 74 %             | Cukup       |
| 4  | Kurang dari 55 %      | Kurang      |

BPBD Prov Jawa Tengah TA 2016 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

### 1. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 (Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB), keberhasilannya diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu tersusunnya pedoman bidang penanggulangan bencana dan terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan daerah. Hasil pengukuran /perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 10**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 1**

| Sasaran Strategis               | Indikator Kinerja                      | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                             | (2)                                    | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Tersusunnya Peraturan bidang PB | Jumlah Pedoman /Peraturan/Sop dalam PB | 1      | 1         | 100       | 300                  | 66 %                                      |
|                                 | Pembentukan BPBD Kab/Kota mll Perda    | 2      | 0         | -         | 117.86 %             | 94.28%                                    |

Pada indikator pertama, BPBD Provisni Jawa Tengah telah membuat kesepahaman tentang organisasi menyongsong diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selama tahun 2016, BPBD Provinsi

Jawa Tengah dengan beberapa BPBD Kabupaten/Kota diajak diskusi dengan BNPB untuk dapat merumuskan beberapa saran dan masukan terkait eksistensi BPBD.

Sedangkan pada indikator sasaran kedua, pada tahun 2016, belum ada penambahan BPBD Kota yang terbentuk, yaitu Kota yang mendasarkan peraturan daerah, yaitu BPBD Kota Salatiga dan Kota Magelang. Pembentukan BPBD di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2016 telah terbentuk 33 BPBD Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, 1 (satu) BPBD (Kota Magelang) berdasarkan Peraturan Walikota dan 1 Kota (Kota Salatiga) belum membentuk BPBD. Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 11**  
**Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah**

| No | Kab/Kota     | Tipe BPBD | Dasar Hukum             | Tanggal ditetapkan |
|----|--------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 1  | 2            | 3         | 4                       | 6                  |
| 1  | Cilacap      | A         | Perda No.22 Tahun 2008  | 27 September 2008  |
| 2  | Banyumas     | B         | Perda No. 14 Tahun 2011 | 25 November 2011   |
| 3  | Purbalingga  | B         | Perda No.15 Tahun 2010  | 13 Desember 2010   |
| 4  | Banjarnegara | B         | Perda No.3 Tahun 2011   | 10 Juni 2011       |
| 5  | Kebumen      | A         | Perda No.8 Tahun 2010   | 6 Oktober 2010     |
| 6  | Purworejo    | A         | Perda No.18 Tahun 2012  | 29 Desember 2012   |
| 7  | Wonosobo     | B         | Perda No.3 Tahun 2014   | Juli 2014          |
| 8  | Magelang     | A         | Perda No.3 Tahun 2011   | 9 Juni 2011        |
| 9  | Boyolali     | A         | Perda No.16 Tahun 2011  | 4 November 2011    |
| 10 | Klaten       | A         | Perda No.8 Tahun 2011   | 25 Juli 2011       |
| 11 | Sukoharjo    | B         | Perda No.4 Tahun 2011   | 24 Juni 2011       |
| 12 | Wonogiri     | B         | Perda No.24 Tahun 2012  | 26 Desember 2012   |
| 13 | Karanganyar  | B         | Perda No.8 Tahun 2011   | 4 April 2011       |
| 14 | Sragen       | B         | No. 3 tahun 2015        | 9 Maret 2015       |
| 15 | Grobogan     | A         | Perda No.6 Tahun 2012   | 27 Maret 2012      |
| 16 | Blora        | B         | Perda No.8 Tahun 2014   | 28 November 2014   |
| 17 | Rembang      | A         | Perda No.4 Tahun 2011   | 4 Agustus 2011     |
| 18 | Pati         | A         | Perda No.4 Tahun 2012   | 4 Juni 2012        |
| 19 | Kudus        | B         | Perda No.4 Tahun 2011   | 5 September 2011   |
| 20 | Jepara       | B         | Perda No. 17 Tahun 2011 | 7 Desember 2011    |

| No | Kab/Kota        | Tipe BPBD | Dasar Hukum              | Tanggal ditetapkan |
|----|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 2               | 3         | 4                        | 6                  |
| 21 | Demak           | A         | Perda No.6 Tahun 2010    | 21 September 2010  |
| 22 | Semarang        | B         | Perda No.3 Tahun 2011    | 19 Mei 2011        |
| 23 | Temanggung      | B         | Perda No.24 Tahun 2011   | 15 Desember 2011   |
| 24 | Kendal          | B         | Perda No.19 Tahun 2011   | 25 Mei 2011        |
| 25 | Batang          | B         | Perda No. 8 tahun 2013   | 19 Agustus 2013    |
| 26 | Pekalongan      | B         | Perda No. 6 Tahun 2011   | 12 Desember 2011   |
| 27 | Pemalang        | B         | Perda No. 16 tahun 2012  | 16 Oktober 2012    |
| 28 | Tegal           | A         | Perda No.11 Tahun 2009   | 22 Mei 2009        |
| 29 | Brebes          | A         | Perda No.9 Tahun 2011    | 24 Maret 2011      |
| 30 | Kota Magelang   | -         | PerWal No. 67 tahun 2013 | 31 Desember 2013   |
| 31 | Kota Surakarta  | B         | Perda No.5 tahun 2013    | 15 Agustus 2013    |
| 32 | Kota Salatiga   | -         |                          | - - -              |
| 33 | Kota Semarang   | A         | Perda No.12 Tahun 2010   | 19 Oktober 2010    |
| 34 | Kota Pekalongan | B         | Perda No 17 tahun 2013   | 31 Desember 2013   |
| 35 | Kota Tegal      | B         | No. 1 Tahun 2014         | 14 Agustus 2014    |

Kedua indicator pada sasaran ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja tersebut telah tercapai dengan sangat baik, dan jika diukur dari target capaian selama 5 (lima) tahun sebagaimana renstra tahun 2014 – 2018 capaian kedua indicator tersebut melebihi dari target. Pencapaian kinerja yang melebihi target tidak dapat dipisahkan dari adanya meningkatnya kepedulian serta komitmen kuat dari para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Bencana yang tiap tahun selalu terjadi di Jawa Tengah diharapkan tidak menimbulkan banyak kerusakan, kerugian, dan korban jiwa/luka-luka.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 43.027.419,- (86,68%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 49.640.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 6.612.581,-.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain Kegiatan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan PB.

Tantangan dalam pencapaian sasaran ini terutama pada indikator pembentukan BPBD Kabupaten/Kota adalah;

- 1) Kewenangan pembentukan organisasi/lembaga BPBD Kabupaten/kota merupakan kewenangan dari pemangku kepentingan Kabupaten/Kota terutama pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Masih minimnya pemahaman aparatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga masalah penanggulangan bencana belum menjadi sebagai kebijakan prioritas pembangunan di daerah dan fokus penanggulangan bencana hanya pada tanggap darurat.

Pembentukan BPBD meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2007 namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala utamanya dari penafsiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja BPBD pada pasal 2 menyebutkan bahwa pembentukan BPBD ditingkat wajib di tingkat provinsi dan dapat membentuk BPBD ditingkat kabupaten/kota, dengan 2 (dua) alternative tipe BPBD, yaitu tipe A dan tipe B. Mendasarkan permendagri tersebut, di Jawa Tengah terdapat 13 (tiga belas) BPBD Kabupaten/Kota tipe A dan 20 (duapuluh) BPBD Kabupaten/Kota tipe B.

Kota Magelang membentuk BPBD mendasarkan Peraturan Walikota dengan pertimbangan bahwa tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana melekat pada SKPD Kesbanglinmas, sedangkan Kota Salatiga belum membentuk BPBD dan tugas pokok fungsi penanggulangan bencana melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Permasalahan belum dibentuknya BPBD di 2 (dua) Kota di Jawa Tengah juga ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur dengan 38 Kabupaten/Kota baru terbentuk 38 BPBD Kabupaten/Kota. 3 (tiga) Kota belum membentuk BPBD, yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar.

Upaya yang perlu terus dilakukan untuk mencapai target pada indikator tersebut adalah:

### **Internal :**

- 1) Melakukan inisiasi dan pendampingan kelembagaan yang lebih intensif kepada para penyelenggara kebijakan strategis di Kabupaten/Kota baik eksekutif maupun legislatif sehingga dapat segera membentuk BPBD;
- 2) Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan akselerasi pembentukan BPBD di Kabupaten/Kota;
- 3) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar secara simultan menyusun regulasi penanggulangan bencana yang lebih spesifik seperti, regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana aksi daerah penanggulangan bencana, rencana kontijensi serta regulasi penanggulangan bencana lainnya.
- 4) Perlunya dukungan anggaran yang lebih memadai untuk melakukan akselerasi pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Jateng akan membentuk BPBD;

### **Eksternal**

- 1) Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mempertegas upaya pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota
- 2) Mengoptimalkan kebijakan BNPB dalam pemberian stimulan anggaran kebencanaan hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah membentuk BPBD dengan perda sedangkan BPBD yang dibentuk dengan perbup/wali atau bahkan belum membentuk hanya bantuan yang bersifat kedaruratan saja.
- 3) Dukungan secara tegas dari pemerintah pusat terkait kelembagaan BPBD dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang organisasi perangkat daerah

## **2. Sasaran strategis 2**

Sasaran strategis 2 (Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah) diukur melalui indikator sasaran kinerja tentang penyusunan pedoman penanganan darurat. Indikator ini tercapai melalui pelaksanaan pemantauan kejadian bencana dan penyusunan pedoman dalam penanganan darurat

dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Perihal Penetapan Surat Siaga Darurat Banjir dan tanah longsor 2016 – 2017.

Sedangkan pada indikator kedua yaitu diperoleh melalui kesepahaman bersama antara SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mengampu program/ kegiatan kebencanaan. Masing-masing SKPD pengampu kebencanaan saling menunjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Indikator sasaran ketiga diperoleh melalui sinergi dan konsolidasi antara BPBD Kabupaten/Kota dalam manajemen logistik di daerah. Selama ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan bahwa stok logistik bencana provinsi ditempatkan BPBD kabupaten/Kota dan jika terjadi bencana, maka stok tersebut dapat digunakan. Jika stok di kabupaten/kota terdampak habis, maka stok logistic milik provinsi yang ditempatkan di kabupaten/kota terdekat diharuskan untuk dimobilisasikan di daerah terdampak.

**Tabel 12**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 2**

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                                                           | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                | (2)                                                                         | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah | Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana                              | 0      | 0         | 100       | 400                  | 400                                       |
|                                                    | Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah | 1      | 1         | 100       | 200                  | 100                                       |
|                                                    | Tersusunnya system manajemen logistic PB                                    | 1      | 1         | 100       | 100                  | 100                                       |

**a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 960,648,912,- (93,14%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,031,414,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 70,765,088,- (6,86%). Efisiensi anggaran berasal dari efisiensi

belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas, honorarium narasumber, sewa ruang rapat/pertemuan dan penggandaan.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain adalah :

- 1) Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
- 2) Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan
- 3) Koordinasi Lintas Sektor Lintas Wilayah
- 4) Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana

### **3. Sasaran Strategis 3**

Sasaran strategis 3, yaitu terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Indikator sasaran yang pertama telah tercapai pada tahun 2014-2015, yaitu penyusunan dan sosialisasi rencana penanggulangan bencana (RPB) Prov Jawa Tengah. RPB Jawa Tengah berlaku 5 (lima) tahun yaitu 2014 – 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Pergub No. 44 tahun 2014. Dengan demikian RPB ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Jawa Tengah 2013 – 2018. Namun untuk mengawal bahwa program kegiatan RPB merupakan dokumen utama dalam menyusun dokumen tematik bidang kebencanaan, antara lain penyusunan rencana kontinjensi.

Sasaran strategis ini dilaksanakan pula dengan identifikasi dari daeran risiko bencana kekeringan melalui penyusunan peta risiko kekeringan di 6 Kabupaten, yaitu Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Tegal Banjarnegara, dan Brebes. Dengan demikian target pada sasaran ini yang terdiri dari tersusunnya 2 (dua) dokumen PB dan sosialisasinya serta dokumen peta risiko bencana kekeringan di 6 (enam) Kabupaten /Kota telah terpenuhi 100%. Capaian indicator sasaran ketiga disajikan dalam table berikut.

**Tabel 13**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 3**

| Sasaran Strategis                                                                                                  | Indikator Kinerja                               | Target         | Realisasi      | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                | (2)                                             | (3)            | (4)            | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah | Tersusunnya Rencana PB Jateng                   | 1              | 1              | 100       | 160                  | 80                                        |
|                                                                                                                    | Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng | 1 peta (6 kab) | 1 peta (6 kab) | 100       | 440                  | 74.28                                     |

**a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 414,712,308,- (79,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 521,000,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 106,287,692,- (20.40). Efisiensi keuangan dipengaruhi efisiensi belanja dekorasi/dokumentasi, jasa narasumber, sewa ruang rapat, sewa kendaraan, perjalanan dinas.

**b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dengan telah dilaksanakannya program penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan
- 2) Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Contingency Plan)

Pada pencapaian sasaran ini, didukung pula oleh pemangku kepentingan di daerah serta adanya kerjasama dengan penggiat PB terutama untuk kegiatan penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir, sehingga dokumen tersebut dapat selesai sesuai target dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### 4. Sasaran strategis 4

Sasaran strategis 4, yaitu terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat. Pencapaian sasaran strategis ini dihitung berdasarkan indikator jumlah kursus/diklat yang diikuti. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 14**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 4**

| Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                                                        | Target      | Realisasi   | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                             | (2)                                                                                      | (3)         | (4)         | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana | jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti | 10 kali     | 15 kali     | 150       | 118.18               | 60                                        |
|                                                                 |                                                                                          | 2.100 orang | 2.100 orang | 100       | 93.33                | 60                                        |
|                                                                 | Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB                                        | 500 orang   | 500         | 100       | 100                  | 113.85                                    |

##### a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 347,491,097,- (95,05%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 365,575,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 18,083,903,- (4,95%). Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber dan peserta kegiatan.

##### b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

- a) Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia
  - b) Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - d) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- a) Penyusunan Dokumen Tematik Bidang Kebencanaan

Pada pencapaian sasaran ini, didukung para pemangku kepentingan di daerah serta adanya kerjasama dengan penggiat PB.

## 5. Sasaran Strategis 5

Sasaran strategis 5, yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dinilai dari 3 (tiga) indicator kinerja, yaitu dari penambahan jumlah sarana/prasarana, penambahan asset dan pemulihan sarana/prasana terdampak bencana. Pengelolaan aset asset pada BPBD Prov Jateng tahun 2016, antara lain disajikan pada tabel berikut

**Tabel 15**  
**Penambahan Aset BPBD Prov Jateng**

a. Penambahan asset berasal APBD Prov Jawa Tengah

| No | Jenis /Nama Barang                 | Jumlah    | Nilai (Rp)         |
|----|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1  | 2                                  | 3         | 4                  |
| 1  | Vallet Besi                        | 21        | 58.740.000         |
| 2  | Rak Besi Tk 4                      | 1         | 14.954.500         |
| 3  | PC Komputer (Dekstop HP 455 -010L) | 15        | 111.870.000        |
| 4  | Printer HP Laserjet                | 18        | 42.075.000         |
| 5  | Epson Printer LQ 590               | 2         | 14.960.000         |
| 6  | Alat Selam                         | 2         | 59.997.000         |
| 7  | Damkar Mini                        | 2         | 12.500.000         |
| 8  | Vertikal Rescue                    | 3         | 54.000.000         |
| 9  | Motor Tempel 25 PK                 | 1         | 36.000.000         |
| 10 | Radio Walky Talky                  | 8         | 9.000.000          |
|    | <b>Jumlah</b>                      | <b>72</b> | <b>414.096.500</b> |

b. Penambahan asset berasal dari pelimpahan dari BNPB ke BPBD Prov

Jawa Tengah

| No | Jenis Barang      | Merk       | Tahun Pembelian | Harga (Rp)    | Jumlah | Keterangan   |
|----|-------------------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------|
| 1  | 2                 | 3          | 4               | 5             | 6      | 7            |
| 1  | Handy Talky       | ICOM       | 2012            | 19,140,000    | 10     | Komunikasi   |
| 2  | Prahu Karet       | Silinger   | 2012            | 195,965,715   | 1      | Angkutan     |
| 3  | Mesin Prahu 25 PK | Parsun     | 2012            | 35,917,200    | 1      | Angkutan     |
| 4  | Mesin Prahu 40 PK | Mercuri    | 2012            | 78,400,300    | 1      | Angkutan     |
| 5  | Tenda Posko       | -          | 2012            | 61,160,000    | 1      | Rumah Tangga |
| 6  | Tenda Pengungsi   | -          | 2012            | 266,750,000   | 5      | Rumah Tangga |
| 7  | Tenda Keluarga    | -          | 2012            | 34,419,000    | 7      | Rumah Tangga |
| 8  | Solar Cell        | -          | 2012            | 297,000,000   | 20     | Komunikasi   |
| 9  | Solar Handle Lamp | -          | 2012            | 9,900,000     | 20     | Komunikasi   |
| 10 | Velbed            | -          | 2012            | 39,600,000    | 50     | Keamanan     |
| 11 | Handi Talky       | ICOM       | 2012            | 9,570,000     | 5      | Komunikasi   |
| 12 | RIG               | ICOM       | 2012            | 12,947,000    | 2      | Komunikasi   |
| 13 | SSB               | ICOM       | 2012            | 45,727,000    | 2      | Komunikasi   |
| 14 | Senter HID        | -          | 2012            | 50,050,000    | 2      | Komunikasi   |
| 15 | Genzet 1.2 KVA    | -          | 2012            | 2,200,000     | 1      | Besar        |
| 16 | Genzet 10         | -          | 2012            | 33,275,000    | 1      | Besar        |
| 17 | Mobil WTP         | Isuzu      | 2010            | 409,500,000   | 1      | Angkutan     |
| 18 | Water Trebmen     | -          | 2010            | 43,760,000    | 1      | Angkutan     |
| 19 | Mobil Dapur Umum  | Mitsubishi | 2010            | 448,403,882   | 1      | Angkutan     |
|    |                   |            |                 | 2,093,685,097 | 132    |              |

Sumber : Laporan Mutasi Barang Semester II BPBD Prov Jateng

Mendasarkan data tabel tersebut, maka dukungan dari berbagi pihak sangat membantuk bagi BPBD Prov Jawa Tengah. Rincian capaian sasaran strategis ini sebagai berikut.

**Tabel 16**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 5**

| Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja                              | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                      | (2)                                            | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana | jumlah sarana dan prasarana PB                 | 5      | 25        | 500       | 40                   | 70                                        |
|                                                          | Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana | 35     | 35        | 100       | 100                  | 80                                        |

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 2.551.999.018,- (94,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.715.000.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 163.000.982,-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber.

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Penambahan asset sarana dan prasarana pendukung gpB tidak terlepas dari adanya dukungan dari BNPB kepada BPBD Prov Jawa Tengah. APBD Prov Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
- 3) Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
- 4) Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana
- 5) Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng
- 6) Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng
- 7) Sinergitas multisektor pascabencana

## 6. Sasaran strategis 6

Sasaran strategis 6, yaitu meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya. Pada dasarnya capaian sasaran ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana, antara lain melalui dialog interaktif yang dilaksanakan melalui media televisi dan radio, selain itu dilaksanakan pula kegiatan simulasi dan gladi kebencanaan dalam sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat. Target capaian pada sasaran ini tercapai 100 % baik dari jumlah pendampingan maupun lokasi kegiatan.

**Tabel 17**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 6**

| Sasaran Strategis                                                                             | Indikator Kinerja                                                      | Target                       | Realisasi                   | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                                                           | (2)                                                                    | (3)                          | (4)                         | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan antisipasi ancaman bahaya | Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB                                | 6 kali , 3 kab/kot a 500 org | 6 kali , 3 kab/kota 665 org | 100       | 6                    | 40                                        |
|                                                                                               | Jumlah masyarakat/relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan | 150 org                      | 500 org                     | 233       | 233                  | 83.3                                      |

### a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1,782,611,962,- (89,94%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,981,955,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 199,343,038 (10.06%),-. Efisiensi keuangan dipengaruhi oleh pemilihan lokasi kegiatan yang menggunakan asset pemerintah daerah, dan pada belanja honorarium narasumber.

## b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan PB dengan kegiatan, yaitu:

- 1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan PB Kawasan Gunung Berapi
- 2) Pengembangan Budaya Sadar Bencana
- 3) Gladi Manajemen Bencana
- 4) Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- 5) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
- 6) Pendidikan Kemasyarakatan
- 7) Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
- 8) SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sedekah Laut/Sura
- 9) Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

## 7. Sasaran strategis 7

Sasaran strategis 7 adalah terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB. Pada dasarnya capaian sasaran ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana (mastana).

Dalam pengembangan Mastana, dilakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan warga untuk dapat mengelola risiko akibat bencana alam atau teknologi yang dapat mengganggu keselamatan hidup dan penghidupan masyarakat desa. Sasaran dari kegiatan Pengembangan Mastana adalah Aparatur Pemerintah Desa, TNI/Polri, Tokoh Masyarakat Desa, Karang Taruna Desa, PKK Desa, Lembaga usaha desa di 8 (delapan) desa terpilih pada 6 (enam) Kabupaten di Jawa Tengah. Prioritas pemilihan lokasi kegiatan adalah desa/kelurahan yang memiliki ancaman bencana. Hasil kegiatan adalah terbentuknya 8 (delapan) Desa Tangguh Bencana di desa/kelurahan dan sekaligus sebagai pijakan menuju terbentuknya Desa Berdikari/Mandiri.

Mendasarkan target pada RPJMD pada tahun 2016 direncanakan akan dibentuk 2 (dua) desa tangguh bencana, namun pada kenyataannya BPBD

Prov Jawa Tengah dapat membentuk 8 (delapan) desa tangguh bencana. Capaian kinerja ini diperoleh karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pembentukan desa tangguh bencana tersebut. Capaian kinerja pembentukan desa tangguh bencana di dukung melalui kegiatan Masyarakat Tangguh bencana pada program penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembentukan masyarakat tangguh bencana tahun 2016, yaitu:

- a. Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri,
- b. Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar
- c. Desa Kemiri Kecamatan Sumpyuh Kabupaten Banyumas,
- d. Desa Gombolharjo Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap,
- e. Desa Donorati Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- f. Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo,
- g. Desa Sampang Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
- h. Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen,

**Tabel 18**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 7**

| Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja           | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                         | (2)                         | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB | Jumlah desa siaga bencana   | -      | -         | -         | -                    |                                           |
|                                                             | Jumlah desa tangguh bencana | 6      | 8         | 133.3     | 300                  | 75                                        |

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 819,169,631,- (91,02%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 900,000,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 80,830,369,- (8,98%)

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan

Pengembangan masyarakat tangguh Bencana. Kegiatan tersebut salah satu icon dalam pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana dan menjadi progam secara nasional dari BNPB.

## 8. Sasaran strategis 8

Sasaran strategis 8 yaitu terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok/komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana. Capaian sasaran ini diukur pada 5 (lima) indikator sasaran yang menggambarkan kinerja sasaran. Untuk indikator kerjasama PB dilaksanakan dengan UGM, UNS, Unika Soegijapranata, ASB, Mercy Corp, PMI, dan UNESCAP.

Indikator publikasi di media dilakukan melalui media Televisi (TVRI dan Kompas TV), media Cetak (Suara Merdeka, Harian Banyumas,) Radio (Sindo Trijaya FM, ElShinta, dll), leaflet berbagai jenis ancaman bencana, dan juga baliho. Selain keempat hal tersebut, publikasi melalui media website juga dilakukan sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat secara umum. Selain itu adanya berbagai media social telah digunakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk mensosialisasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai sarana keterbukaan informasi public. Dengan demikian, melalui media social, masyarakat dapat mengetahui aktivitas BPBD Prov Jawa Tengah. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 19**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 8**

| Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                  | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                                                                | (2)                                                                | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok/komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli | 1) jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi | 2      | 2         | 100       | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                    | 2) Jumlah komunitas peduli bencana                                 | 1      | 1         | 100       | 200                  | 60                                        |
|                                                                                                    | 3) jumlah dunia usaha terlibat PB                                  | 10     | 10        | 100       | 100                  | 60                                        |

| Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                  | (2)                                                     | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| bencana dalam penanggulangan bencana | melalui alokasi dana CSR                                |        |           |           |                      |                                           |
|                                      | 4) Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah | 2      | 3         | 150       | 150                  | 60                                        |
|                                      | 5) Jumlah media publikasi data dan informasi PB         | 3      | 3         | 100       | 100                  | 60                                        |

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 615,343,263,- (82,54%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 745,492,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp 130,148,737,- (17.46%).

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan:

- 1) Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)
- 2) Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah
- 3) Koordinasi dan Pengembangan *Corporate Social Responsibility* untuk Reduksi Bencana
- 4) Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- 5) Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana
- 6) Koordinasi Penanganan Bencana

Sasaran kinerja ini pada prinsipnya adalah menggalang kerjasama bidang penanggulangan bencana seluas-luasnya dengan berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi. Media Massa dipandang sebagai lembaga usaha termasuk didalamnya. Kerjasama PB juga menjadi isu bersama antar pemerintah daerah baik antar pemerintah kabupaten/kota maupun antar

provinsi. Oleh sebab itu kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk saling mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana telah ditempuh guna mewujudkan masyarakat tangguh.

## 9. Sasaran strategis 9

Sasaran strategis 9 yaitu Tersedianya pusat data dan informasi bencana, bencana jateng terkini. Capaian sasaran ini diukur pada 4 (empat) indikator sasaran yang menggambarkan kinerja sasaran penyediaan data dan informasi kejadian bencana dan kerusakan / kerugian jateng terlaksana dengan pemantauan dan pelaporan secara rutin melalui posko bencana yang berlangsung setiap hari selama satu tahun.

**Tabel 20**  
**Perhitungan Kinerja Sasaran 9**

| Sasaran Strategis                                                                         | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                                                       | (2)                                                     | (3)    | (4)       | (5)       | (6)                  | (7)                                       |
| Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini | Tersedia data dan informasi bencana                     | 1      | 1         | 100       | 100                  | 60                                        |
|                                                                                           | Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng | 1      | 1         | 100       | 100                  | 60                                        |
|                                                                                           | System early warning masyarakat                         | 1      | 1         | 100       | 100                  | 60                                        |
|                                                                                           | Jumlah publikasi di media                               | 100    | 160       | 160       | 160                  | 60                                        |

Data kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2016, tercatat sebanyak 2.112 (dua ribu seratus dua belas) kejadian bencana, dengan taksiran kerugian akibat bencana mencapai Rp.3.235.040.501.000,- Kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana tanah longsor yaitu 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) kejadian atau 30.47%,-. Sedangkan dari aspek kerusakan/kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana banjir dengan taksiran sebesar Rp.1.913.639.342.000,-. Rekapitulasi kejadian

bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut ini

**Tabel 21**  
**Kejadian dan Kerugian Bencana Jateng 2016**

| No    | Jenis Bencana   | 2016*  |       |               |
|-------|-----------------|--------|-------|---------------|
|       |                 | Jumlah | %     | Kerugian      |
| 1     | 2               | 3      | 4     | 5             |
| 1     | Angin Topan     | 419    | 19,84 | 7.648.565     |
| 2     | Banjir          | 298    | 14,11 | 1.914.023.342 |
| 3     | Tanah Longsor   | 927    | 43,89 | 185.627.303   |
| 4     | Kekeringan      | -      | -     | -             |
| 5     | Kebakaran       | 468    | 21,16 | 1.127.741.291 |
| 6     | Gempa Bumi      | -      | -     | -             |
| 7     | Letusan Gn. Api | -      | -     | -             |
| 8     | Gas Beracun     | -      | -     | -             |
|       | Tsunami         | -      | -     | -             |
| Total |                 | 2.112  | 100   | 3.235.040.501 |

\* Laporan sampai dengan 31 Desember 2016

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1,025,351,050,- (98,55%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,040,386,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 15,034,950,- (1,45%).

b. Analisis Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan, kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
  - a) Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jateng
- 2) Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
  - a) Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana
- 3) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  - a) Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana
  - b) Pengembangan sistem peringatan dini bencana tanah Longsor (*Early Warning System*) Berbasis Masyarakat

## B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah TA 2016 didukung oleh dana APBD Prov Jawa Tengah dan APBN dengan nilai total keduanya sebesar Rp 26.306.001.000,- dengan rincian :

### 1. APBD :

|                                 |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung (BTL) | Rp. | 8.978.059.000,-  |
| b. Belanja Langsung (BL)        | Rp. | 15.608.914.000,- |
| 1) Belanja Pegawai              |     | 1.803.790.000,-  |
| 2) Belanja Barang / Jasa        |     | 13.303.756.000,- |
| 3) Belanja Modal                |     | 501.368.000,-    |
| c. Total Belanja (BTL + BL)     | Rp. | 24.586.973.000,- |

### 2. APBN :

Anggaran BNPB yang dikelola pada BPBD Prov Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

|                                         |     |                 |
|-----------------------------------------|-----|-----------------|
| a. Kementerian Dalam Negeri             | Rp. | 481.000.000,-   |
| b. BNPB                                 | Rp. | 1.238.028.000,- |
| 1) DSP Banjir Tanah longsor             |     | 970.080.000,-   |
| 2) Penguatan Kelembagaan                |     |                 |
| a) Penguatan Pengurangan Risiko Bencana |     | 267.948.000     |
| c. Total APBN (a + b)                   | Rp. | 1.719.028.000,- |

Realisasi penggunaan anggaran untuk belanja program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 22**  
**Realisasi dan Efisiensi Anggaran**

| NO | SUMBER DANA                  | JUMLAH         | REALISASI |                |         | EFISIENSI KEUANGAN | KETERANGAN                 |
|----|------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------|--------------------|----------------------------|
|    |                              |                | Fisik %   | KEU (Rp)       | KEU (%) |                    |                            |
| 1  | 2                            | 3              | 4         | 5              | 6       | 7                  | 8                          |
| 1  | APBD                         | 24.586.973.000 | 100       | 23.522.618.333 | 95,67   | 1.064.354.667      |                            |
| a  | Belanja Tidak Langsung (BTL) | 8.978.059.000  | 100       | 8.641.825.546  | 96.25   | 336.233.454        | Efisiensi Sesuai kebutuhan |
| b  | Belanja Langsung             | 15.608.914.000 | 100       | 14.880.792.787 | 95.33   | 728.121.213        | Efisiensi Sesuai kebutuhan |

| NO | SUMBER DANA                          | JUMLAH         | REALISASI |             |         | EFISIENSI KEUANGAN | KETERANGAN                                            |
|----|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                      |                | Fisik %   | KEU (Rp)    | KEU (%) |                    |                                                       |
| 1  | 2                                    | 3              | 4         | 5           | 6       | 7                  | 8                                                     |
| 2  | APBD                                 | 2.187.015.000  | 100       |             |         |                    |                                                       |
| a  | Kementerian Dalam Negeri             | 481.000.000    | 100       | 475.292.234 | 98.81   | 5.707.776          | Efisiensi sesuai kebutuhan                            |
| b  | BNPB                                 | 1.545.518.000  | 100       |             |         |                    |                                                       |
|    | - DSP Banjir Tanah longsor           | 970.080.000    | 100       | -           | -       | -                  | Laporan pertanggungjawaban dihitung per 31 Maret 2017 |
|    | - Penguatan Kelembagaan              |                |           |             |         |                    |                                                       |
|    | Penguatan Pengurangan Risiko Bencana | 267.948.000    | 100       | 183.840.000 | 68.61   | 84.108.000         |                                                       |
| 3  | TOTAL (1+2)                          | 26.306.001.000 |           |             |         | 1.154.170.443      |                                                       |

Efisiensi anggaran belanja langsung kegiatan antara lain terdapat pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, honorarium narasumber/instruktur, belanja makan dan minum rapat, dan sewa ruang rapat/pertemuan. Efisiensi belanja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan kebijakan di tingkat Pusat dan provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan dengan diprioritaskan di tempat-tempat instansi pemerintah
- Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
- Rasionalisasi/optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.
- Adanya Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov Jawa Tengah, yaitu:
  - SE No. 900/0008450 tanggal 20 Mei 2016 perihal Rasionalisasi Belanja Langsung TA 2016
  - SE No. 903 /0016730 tanggal 30 September 2016 perihal Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2016

## BAB IV PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Keberhasilan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah disimpulkan berhasil, mengingat telah tercapainya seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan kategori Amat Baik. Hal tersebut didukung dengan perhitungan capaian sasaran sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 76.54% (BAIK), dengan rincian pencapaian persasaran masing-masing adalah sbb.

**Tabel 23**  
**Pengukuran Pencapaian Sasaran**

| Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                              | Target | Realisasi | capaian (%) | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                | (2)                                            | (3)    | (4)       | (5)         | (6)                  | (7)                                       |
| Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang PB           | Peraturan/Pedoman/SOP dalam PB                 | 1      | 1         | 100         | 300                  | 66                                        |
|                                                    | Pembentukan BPBD Kab/Kota mll Perda            | 2      | 0         | -           | 117.86               | 94.28                                     |
|                                                    |                                                |        |           | 100         |                      | 80.14                                     |
| Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah | Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana | -      | -         | -           | 400                  | 400                                       |
|                                                    | Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan        | 1      | 1         | 100         | 200                  | 100                                       |

| Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                                        | Target              | Realisasi           | capaian (%) | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                                                            | (2)                                                                                      | (3)                 | (4)                 | (5)         | (6)                  | (7)                                       |
|                                                                                                | PB lintas sektor dan lintas wilayah                                                      |                     |                     |             |                      |                                           |
|                                                                                                | Tersusunnya system manajemen logistic PB                                                 | 1                   | 1                   | 100         | 100                  | 100                                       |
|                                                                                                |                                                                                          |                     |                     | 200         | 200                  | 200                                       |
| Terintegrasi ya dokumen Rencana PB (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah | Tersusunnya Rencana PB Jateng                                                            | 1                   | 1                   | 100         | 150                  | 80                                        |
|                                                                                                | Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng                                          | 1 peta (6 kab)      | 1 peta (6 kab)      | 100         | 440                  | 74.28                                     |
|                                                                                                |                                                                                          |                     |                     | 200         |                      | 77.14                                     |
| Terpenuhi nya sumber daya yang siap dalam penanggulan gan bencana                              | jml kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan /diikuti | 13 kali             | 26 kali             | 200         | 118.18               | 60                                        |
|                                                                                                |                                                                                          | 2.100 orang         | 2.100 orang         | 100         | 93.33                | 60                                        |
|                                                                                                | Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB                                        | 500                 | 500                 | 100         | 70                   | 113                                       |
|                                                                                                |                                                                                          |                     |                     | 400         |                      | 77.67                                     |
| Terpenuhi nya sarana dan prasarana penanggulan gan bencana                                     | jumlah sarana dan prasarana PB                                                           | 5                   | 25                  | 500         | 40                   | 70                                        |
|                                                                                                | Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana                                           | 35                  | 35                  | 100         | 100                  | 80                                        |
|                                                                                                |                                                                                          |                     |                     | 600         |                      | 75                                        |
| Meningkatny a kesadaran & pemaham an masyt untuk mengenali & antisipasi                        | Jumlah masyarakat / relawan terlatih PB                                                  | 6 kali , 3 kab/kota | 6 kali , 3 kab/kota | 100         | 6                    | 40                                        |
|                                                                                                | Jumlah masyarakat/relawa n mempunyai ser-                                                | 150                 | 500                 | 233         | 233                  | 83.3                                      |

| Sasaran Strategis                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                               | Target | Realisasi | capaian (%) | % Capaian Tahun 2013 | % Capaian thd Target Akhir Renstra (2018) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                     | (2)                                                             | (3)    | (4)       | (5)         | (6)                  | (7)                                       |
| ancaman bahaya                                                                                                                          | tifikasi / keterangan pelatihan                                 |        |           |             |                      |                                           |
|                                                                                                                                         |                                                                 |        |           | 333         |                      | 61.65                                     |
| terwujudnya kemandirian masyarakat dalam peny PB                                                                                        | Jumlah desa tangguh bencana                                     | 6      | 8         | 133         | 300                  | 75                                        |
|                                                                                                                                         |                                                                 |        |           | 133         |                      | 75                                        |
| Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok/komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana | 1) jumlah kerjasama PB dgn lembaga penelitian/ perguruan tinggi | 2      | 2         | 100         | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 2) Jumlah komunitas peduli bencana                              | 1      | 1         | 100         | 200                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 3) jumlah dunia usaha terlibat PB melalui alokasi dana CSR      | 10     | 10        | 100         | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 4) Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah         | 2      | 3         | 150         | 150                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 5) Jumlah media publikasi data dan informasi PB                 | 3      | 3         | 100         | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         |                                                                 |        |           | 550         |                      | 60                                        |
| Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana yang terkini                                                 | 1) Tersedia data dan informasi bencana                          | 1      | 1         | 100         | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 2) Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng      | 1      | 1         | 100         | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 3) System early warning masy                                    | 1      | 1         | 100         | 100                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         | 4) Jumlah publikasi di media                                    | 100    | 160       | 160         | 160                  | 60                                        |
|                                                                                                                                         |                                                                 |        |           | 460         |                      | 60                                        |

2. BPBD Prov Jawa Tengah melakukan efisiensi belanja kegiatan sebesar  $\pm 4.39\%$  ( $\pm$  Rp. 1.154.170.443,-). Efisiensi tersebut dapat berubah mengingat satu kegiatan yang bersumber dari BNPB yaitu Dana Siap Pakai (DSP) untuk antisipasi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung, kegiatannya masih berlangsung sampai dengan 31 Maret 2017.

## **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan PB, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi.
2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan baik sebagai refreshing peraturan mengingat adanya perubahan struktur organisasi BPBD di beberapa Kabupaten/Kota
3. Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pada tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD dengan peraturan daerah, untuk segera membentuk BPBD dengan peraturan daerah serta mengisi struktur dan lembaganya dengan personil yang berkompeten.
5. Mendorong BPBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan dokumen perencanaan, seperti rencana penyelenggaraan bencana bencana, rencana kontijensi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

6. Pendokumentasian kegiatan PB sejak dini, termasuk upaya antisipasi dan dijadikan sebagai model sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dan bahkan dapat menjadi pedoman atau *Standard Operational Procedure (SOP)* bagi aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana
7. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
8. Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui Diklat teknis dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi /mutasi aparatur sumberdaya PB yang telah terlatih sehingga mempunyai kompetensi yang sama.
9. Mendorong BNPB untuk melakukan sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring kompetensi dan kapasitas masing-masing aparatur PB melalui Pendidikan dan pelatihan sumberdaya kebencanaan wajib dilakukan setiap periode
10. Pemutakhiran data sumberdaya sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.
11. Memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dapat memberikan alokasi dana untuk pengurangan risiko bencana lebih besar dibandingkan operasional kegiatan penanggulangan yang lain.
12. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Prov Jateng.
13. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga

usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Salam tangguh dan salam kemanusiaan....!